

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Kepala Sekolah

1. Makna teori kebijakan dan sejarahnya

Dalam *Political Theory and Public Policy* karya Goodgin, menunjukkan bahwa kebijakan publik dari segi politik lebih banyak memberikan perhatian kepada substansi, dibandingkan dengan administrasi negara yang lebih memperhatikan masalah pilihan rencana, evaluasi pelaksanaan, efisiensi dan produktivitas, serta hal lain yang tidak berkenaan dengan isi dari kebijakan itu. Meskipun sebenarnya ilmu politik pun mengkaji kebijakan publik sebagai analisis yang bersifat deskriptif dengan membedakan dengan substansi yang disebut *Policy Advocacy* yang bersifat prespektif. Studi kebijakan sebenarnya menurut Goodgin hanyalah "Administrasi negara lama dalam baju yang diperbaharui"

Dye mengartikan kebijakan publik (*public policy*) sebagai *as projected program of goals, values and practices*. Sedangkan Pal lebih kepada tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dipilih oleh otoritas publik dalam upaya mengatasi masalah (*public policy is what the government say to do*).¹

Dua aspek yang kaitannya dengan kebijakan ialah prespektif administratif dan prespektif publik. Dalam prespektif administrasi, kebijakan

¹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Konsep, Teori dan Model* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 33-34.

diartikan sebagai tindakan politik untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Solichin Abdul Wahab bahwa "kebijakan dapat pula bermakna sebagai tindakan politik, atau perintah atau aktor terhadap suatu masalah."

Menyimak beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan negara dengan segala fungsinya berhak untuk membuat atau tidak membuat kebijakan.

Kebijakan publik akan meliputi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagai balikan untuk kembali merumuskan kebijakan yang sesuai. Pendekatan yang umumnya dipengaruhi oleh pendekatan sistem, akan berupaya menjelaskan saling keterpaduan antara lingkungan sistem politik dan kebijakan publik.²

Secara konseptual penulis menyimpulkan bahwa: terminologi kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak

² Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Konsep.*, 33-34.

diberikan makna yang prinsipil, dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat diatas tentang sejarah munculnya teori tentang kebijakan maka dapat dikatakan bahwa kebijakan secara sejarah mengalami perubahan dari waktu ke waktu tergantung dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi.

2. Pengertian kebijakan

Pada hakikatnya pendidikan itu berlangsung seumur hidup, dari sejak dalam kandungan, kemudian melalui sebuah proses dan siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunan pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya.

Secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks rumah tangga negara pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya megandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan

³Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan* .,33-34.

pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan Yang seluas-luarnya bagi warga masyarakat.⁴

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan fondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan yang lainnya. Filosofis dalam kebijakan pendidikan pada dasarnya dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konstitusi. Dalam konteks inilah filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan setiap kebijakan pembangunan dalam bidang pendidikan. Untuk itulah kebijakan yang berpihak sangat diperlukan dari semua pihak, terutama pemerintah khususnya menyangkut dana atau anggaran.⁵

Dalam dunia pendidikan maupun persekolahan kebijakan Menurut Hough “Dalam arti sempit untuk mengacu pada tindakan formal yang diikutinya. Kebijakan disamakan dengan rencana dan program bahkan sering tidak dibedakan antara perbuatan kebijakan dengan pembuatan kebijakan”.

Kebijakan publik dan kebijaksanaan untuk pendidikan berkaitan dengan fungsi-fungsi esensial institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, yang berkaitan dengan pendidikan dan

⁴M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 29.

⁵M. hasbullah, *kebijakanpendidikan*, 29.

pengajaran yaitu: standar dan pengembangan kurikulum, visi, misi penetapan tujuan dan target pendidikan dan lain sebagainya.⁶

Jadi yang dimaksud dengan kebijakan adalah sebuah aturan yang menjadi keharusan untuk mengikutinya yang ditujukan untuk terselenggaranya sebuah program dan harus dilakukan.

3. Pengertian kepala sekolah

Secara sederhana kepemimpinan memiliki definisi kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini mengandung makna bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tunduk atau mengikuti semua keinginan seorang pemimpin.

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok yaitu: pemimpin sebagai subjek, dan dipimpin sebagai objek. kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, atau mengatur.

Menurut Mulyono:

Bahwa kemajuan sekolah akan lebih penting bila orang memberikan atensinya pada kiprah kepala sekolah karena alasan-alasan sebagai berikut. *Pertama*, kepala sekolah merupakan tokoh sentral pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa kepala sekolah sebagai fasilitator bagi pengembangan pendidikan, sebagai pelaksana suatu tugas syarat dengan pembaharuan dan harapan. *kedua*, sekolah adalah sebagai suatu komunitas pendidikan yang membutuhkan seorang pemimpin untuk mendayagunakan potensi yang ada dalam sekolah. Pada tingkatan ini, kepala sekolah berperan sebagai konseptor manajerial yang bertanggung jawab pada kontribusi masing-masing demi efektifitas dan efisiensi kelangsungan pendidikan.

⁶Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2013), 94.

Atau secara definisi menurut Makawimbang “kepala sekolah adalah seorang yang fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar”.⁷

Sebagaimana yang telah ditegaskan diatas, bahwa kepemimpinan atau kepala sekolah diidentikkan dengan visi dan nilai-nilai, sedangkan manajemen diidentikkan dengan proses dan struktur sebagaimana telah diungkapkan oleh Schon yang dikutip oleh Tony Bush :

Kepemimpinan dan manajemen bukanlah merupakan terma yang sinonim. Seorang bisa menjadi pemimpin tanpa harus menjadi manajer. seseorang misalnya, bisa melaksanakan fungsi-fungsi simbolik, inspirasional, edukasional dan normatif pemimpin yang merepresentasikan kepentingan organisasi tanpa harus melaksanakan tugas formal manajemen. Sebaliknya, seseorang bisa *me-manage* tanpa harus memimpin. Seseorang bisa memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas organisasional, membuat keputusan-keputusan, dan mengalokasikan sumber-sumber daya tanpa harus melaksanakan fungsi-fungsi simbolik, normatif, inspirasional, atau edukasional kepemimpinan.⁸

Dari beberapa penjelasan dan pengertian beberapa tokoh dapat diambil sebuah rangkaian kalimat bahwa pengertian kepala sekolah ialah seseorang yang menjadi komando atau ketua dalam dunia persekolahan yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kemajuan sekolah.

4. Fungsi dan tugas kepala sekolah

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Menurut

⁷Jerry H Makawimbang, *Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu* (Bandung: Alfabeta, 2012), 6-7.

⁸Tony Bush & Marianne Coleman, *Manajemen mutu kepemimpinan pendidikan* (Yogyakarta: IRCiOoD, 2012), 63.

Mulyasa “Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak semakin maju, sehingga menuntut penguasaan secara profesional.

Setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana dan berkesinambungan. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, luwes dalam melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan terhadap kinerja guru melalui program pembinaan kemampuan ketenagaan pendidikan.⁹

Kepala sekolah secara administratif menurut Sutrisna: “adalah mengatur kegiatan secara khusus dan saling tergantung sebagai ciri khas setiap organisasi. Para manajer termasuk kepala sekolah sebagai manajer harus belajar menganggulangi kekuatan yang non linier, yaitu ketika masukan

⁹Euis Karwati, *Kinerja dan profesionalisme kepala sekolah* (Bandung: Alfabeta: 2013), 38.

kecil dapat mencetuskan hasil yang besar atau sebaliknya”.¹⁰Jadi kepala sekolah adalah pencetus suatu kebijakan.

Dalam dunia pendidikan tugas kepala sekolah sering dikaitkan dengan istilah supervisor. Seperti ditegaskan oleh Glickman yang dikutip oleh Munifah, “Supervisi pengajaran adalah serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran”.¹¹

Adapun tugas-tugas dari kepala sekolah atau penilik/ pengawas kepala sekolah menurut munifah:

- a. Bantuan langsung kepada guru
Senada dengan Glickman, Wiles mendefinisikan “supervisi sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar”. Dalam pelaksanaan supervisi, kepala sekolah melakukan tiga hal, yaitu:
 - 1) Membimbing guru dalam kegiatan membuat perencanaan mengajar.
 - 2) Membantu guru dalam pengembangan kecakapan.
 - 3) Membantu guru dalam memecahkan masalah.¹²
- b. Pengembangan kelompok
Dalam sistem kelompok kerja seorang kepala sekolah memberikan binaan kepada guru terkait profesionalisme.
- c. Pengembangan profesionalisme
Berkaitan dengan tugas seorang kepala sekolah sebagai seorang supervisor maka dituntut untuk mengembangkan profesionalisme seorang guru, adapun cara pengembangan profesional menurut Munifah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pembinaan, motivasi dan pengakuan terkait peningkatan profesionalisme.
 - 2) Memberikan pelayanan *in-service training*
 - 3) Memberikan kesempatan pada guru untuk meningkatkan profesionalismenya baik melalui worksop, maupun pelatihan-pelatihan yang mendukung.
 - 4) Pengembangan kurikulum, oleh karena kurikulum merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, maka tugas

¹⁰Sagala, *Administrasi Pendidikan.*, 172.

¹¹Munifah, *Manajemen Pendidikan & Implementasinya* (Kediri: Stain Kediri Press, 2009), 105.

¹²Ibid., 106.

seorang kepala sekolah adalah untuk pengembangan kurikulum tersebut agar benar-benar berisi dan berkualitas. Menurut Wiles and Bondi sebagaimana dikutip oleh Mantja bahwa “perkembangan peranan supervisi sebagai pengembang kurikulum terjadi pada periode 1955-1965”.¹³

Dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa peran kepala sekolah sangatlah besar dikarenakan, sebagaimana pendapat diatas seorang kepala sekolah harus menguasai beberapa teknik manajerial agar sekolah yang ia pimpin berjalan dengan visi yang diinginkan, juga bukan kalah pentingnya dalam tataran kualitas pendidikan kepala sekolah juga harus memperhatikan secara seksama baik kualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru pengajar atau kualitas siswa-siswanya.

B. Tinjauan Tentang Pengembangan Kurikulum

1. Pengertian pengembangan kurikulum

Menurut Hamalik kata pengembangan memiliki banyak arti, diantaranya “Perubahan, pembaharuan, perluasan, dan sebagainya. Dalam arti yang sering digunakan atau pada umumnya pengembangan berarti menunjuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan seperlunya.”¹⁴ Jadi yang di maksud dengan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan.

Menurut Nana Saodih,

kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis di berikan kepada peserta

¹³ Munifah, *manajemen pendidikan.*, 106.

¹⁴ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 3.

didik di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta kompetensi sosial peserta didik”.¹⁵

Menurut Saylor, Alexander, dan Levis sebagaimana dikutip oleh Rusman, mengartikan “kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah”. Sementaraitu, Harold B. Albery memandang “kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah”.¹⁶

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan oleh para tokoh diatas yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum ialah serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua para peserta didik dengan tujuan memajukan perkembangan kepribadian si peserta didik dan perkembangan dalam hal ilmu pengetahuan.

2. Landasan pengembangan kurikulum

Toto Ruhimatdkk, mengemukakan empat landasan pengembangan kurikulum, yaitu: “*Philisophy and nature of knowledge, society and culture, the individual, learning theory*” “(filosofi dan pengetahuan alamiah, masyarakat dan kebudayaan, individu dan teori belajar-mengajar)”.

Ruhimatdkk. Mengemukakan pandangan yang erat kaitanya dengan beberapa aspek yang melandasi “*kurikulum (school purposes), yaitu “use of philhosophy, studies of learners, suggestions from subject sepecialist, studies of contemporary life, and use psychology of learning*”.Landasan

¹⁵ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru, 2012), 3.

¹⁶M Fadlillah, *Impelementasi Kurikulum 2013* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 14.

pengembangan kurikulum berkaitan dengan tujuan pendidikan dan psikologi pendidikan.¹⁷

Dari kedua pendapat diatas, dapat dipahami bahwa landasan pokok pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 5 jenis berikut:

a. Landasan filosofis

Landasan filosofis menyangkut dua masalah, yakni falsafah dan tujuan pendidikan. Filsafat suatu negara atau pandangan hidup suatu bangsa berisi ide-ide, cita-cita, sistem nilai yang harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa tersebut. Maka dari itu tujuan pendidikan harus sesuai dengan falsafah bangsa yang dipakai dan benar-benar mencerminkan filsafat bangsa itu.

b. Landasan psikologis

Landasan psikologis merupakan asas yang penting dan harus dimasukkan dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Hal ini menyangkut bagaimana anak harus belajar (ilmu jiwa belajar, ilmu jiwa anak) dan ilmu jiwa perkembangan. Ilmu jiwa belajar adalah pengetahuan tentang bagaimana proses belajar itu berlangsung dalam diri seseorang. Teori tentang proses belajar akan mempengaruhi penyusunan dan penyajian kurikulum yang efektif, disamping itu juga menentukan pemilihan bahan pengajaran yang harus disajikan kepada para peserta didik.¹⁸

¹⁷ Hamdani Hamid, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan* (Bandung: Pustaka Sedia, 2012), 47.

¹⁸ Esti Ismawati, *Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 13-14.

c. Landasan sosial budaya

Karena anak (peserta didik) hidup di masyarakat maka anak pun harus dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat dengan bekal kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Peserta didik perlu dibekali norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan keadaan dan pandangan hidup, nilai-nilai atau ajaran fiasafat yang diyakini tetap terpelihara dengan aman apabila dasar sosial budaya juga dimasukkan dan diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum.

d. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset dan penelitian adapun yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan pengembangan kurikulum ialah penggunaan alat-alat ataupun teknologi yang membantu dalam pengembangan kurikulum seperti media elektronik, media cetak ataupun media tulis dikarenakan pada saat era modern ini teknologi sangat cepat dalam perkembangannya maka dari itu harus dimanfaatkan dalam pengarahannya ke hal yang bersifat positif oleh sebab itu ilmu pengetahuan dan teknologi dimasukkan dalam rencana pengembangan kurikulum.¹⁹

e. Landasan akurasi manajemen

Dasar akurasi manajemen ialah dapat mengorganisasi yang berhubungan dengan pengorganisasian terhadap kurikulum, yakni dalam

¹⁹ Esti Ismawati, *Telaah Kurikulum*,. 15

bentuk penyajian mata pelajaran yang harus disampaikan kepada para peserta didik. Pengorganisasian kurikulum dari struktur horizontal dipengaruhi atau didasarkan pada pandangan ilmu jiwa. Misalnya ilmu jiwa asosiasi menghendaki penyajian mata pelajaran yang terpisah (*separate subject curriculum*), ilmu jiwa *gestalt* menganjurkan penyajian mata pelajaran dalam bentuk unit (*integrated curriculum*). Sedangkan dilihat dari struktur vertikal, manajemen kurikulum berhubungan dengan masalah pelaksanaan dan pengaturan kegiatan secara keseluruhan di sekolah.²⁰

Menurut beberapa uraian di atas landasan dalam pengembangan kurikulum itu menjadi sebuah dasar yang harus diposisikan ke dalam urutan yang pertama dalam penyusunan sebuah pengembangan kurikulum agar sesuai dengan falsafah, tujuan dan kondisi di sebuah bangsa atau negara tersebut terkait dengan pengembangan kurikulum.

3. Fungsi kurikulum

Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa lain tidak akan sama karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan, maupun kebutuhan negara itu sendiri. Dengan demikian,

²⁰ Ibid., 15.

- a. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
- b. Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan-tujuan itu.
- c. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.²¹

Bagi sekolah yang bersangkutan, kurikulum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan
- b. Sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut, fungsi ini meliputi:
 - 1) Jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan
 - 2) Cara penyelenggaraan setiap jenis program pendidikan
 - 3) Orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan.

Terkait dengan fungsi kurikulum menurut Arifin:

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi dan misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Kurikulum sebagai alat dapat diwujudkan dalam bentuk program, yaitu kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Program tersebut harus dirancah secara sistematis, logis, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan.²²

²¹ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 72.

²² Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 13.

Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, Alexander Inglis mengemukakan, fungsi kurikulum meliputi:

a. Fungsi penyesuaian

Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat *well adjusted* yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

b. Fungsi integrasi

Fungsi integrasi makna bahwa kurikulum sebagai pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh.

c. Fungsi diferensiasi

Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa.

d. Fungsi persiapan

Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya.

e. Dan lain-lain.²³

Berdasarkan uraian diatas maka fungsi kurikulum itu dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan dilakukannya pengembangan kurikulum, oleh sebab itu fungsi kurikulum disini sebagai alat yang

²³Fitri, Zaenul Agus, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam Dari Normatif-Filosofis ke Praktis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 115-116.

digunakan guru untuk menilai dan sebagai acuan untuk pengaplikasian pengembangan kurikulum.

4. Komponen-komponen pengembang kurikulum

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen-komponen pokok yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi:

a. Komponen Tujuan

Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal, yaitu: (1) perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat, (2) didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara.

b. Komponen Isi

Isi program kurikulum atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pemelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dan isi program masing-masing mata pelajaran tersebut.²⁴

c. Komponen Strategi

Menurut JR. Davidd yang dikutip oleh Sholeh Hidayat strategi diartikan sebagai “perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu”

d. Komponen Media (sarana dan prasarana)

²⁴ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru* (Bandaung: Remaja Rosdakarya, 2015), 51-58.

Media adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti: buku, film, video dan sebagainya atau media adalah komponen sarana komunikasi baik dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk perangkat keras.

e. Komponen proses belajar mengajar

Peranan penting dalam keberhasilan pengajaran dalam proses pelaksanaan pengajaran yang baik, sangat dipengaruhi perencanaan yang baik. Keefektifan dan keefesian proses pelaksanaan pengajaran dibutuhkan sebuah perencanaan yang tersusun secara baik dan sistematis sehingga proses belajar mengajar lebih bermakna dan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar.

f. Komponen evaluasi

Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektifitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat diartikan dan dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum dan digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan.²⁵

Dari paparan diatas dalam pengembangan kurikulum ada beberapa komponen yang wajib ada dalam kurikulum yakni komponen tujuan, isi, strategi, media, proses belajar mengajar, dan komponen evaluasi hal ini digunakan agar dalam pembuatan kurikulum dapat tersusun jelas dan sesuai dengan yang diharapkan.

²⁵ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum.*, 51-58.

5. Model-model pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang memengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem (nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial), proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Modal pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain (*designing*), menerapkan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaluation*) suatu kurikulum. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum.²⁶ Adapun Model model pengembangan kurikulum yaitu:

a. Model Ralph Tyler

Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan Tyler ada empat tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yang meliputi:

1. Menentukan tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan, sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas sampai pada rumusan tujuan

²⁶ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 78.

khusus guna mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan, yaitu: 1) hakikat peserta didik 2) kehidupan masyarakat masa kini, 3) pandangan para ahli bidang studi.

2. Menentukan proses pembelajaran

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik, artinya, pengalaman yang sudah dimiliki siswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya.

3. Menentukan Organisasi Pengalaman Belajar

Bahan yang harus dipelajari peserta didik dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan, diorganisasikan, sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan. Kejelasan tujuan, materi belajar dan proses pembelajaran serta urutan-urutan, akan mempermudah untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan.²⁷

4. Menentukan Evaluasi Pembelajaran

Jenis penilaian yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Model Administratif

²⁷ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum.*, 79

Pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Langkah kedua membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang meliputi: ahli pendidikan, kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan, dan pihak dunia kerja.

Tim ini bertugas untuk mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi pengembangan kurikulum yang selanjutnya menyusun kurikulum secara operasional berkaitan dengan pengembangan atau perumusan tujuan pendidikan maupun pembelajaran, pemilihan dan penyusunan rambu-rambu dan substansi materi pelajaran, menyusun alternatif proses pembelajaran, dan menentukan penilaian pembelajaran.²⁸

c. Model Grass Roots

Dalam prosesnya pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model Grass Roots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju pada bagian-bagian yang lebih besar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model Grass Roots, diantaranya: 1) guru harus

²⁸ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum.*, 79

memiliki kemampuan yang profesional, 2) guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum; 3) guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi; 4) seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana.²⁹

d. Model Miller- Seller

Pengembangan kurikulum ini ada perbedaan dengan model-model sebelumnya. Model pengembangan kurikulum Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi (Gagne) dan model transaksi (Taba's & Robinson), dengan tahapan pengembangan sebagai berikut:

1. Klarifikasi Orientasi Kurikulum

Orientasi ini merefleksi pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Menurut Miller dan Seller, ada tiga jenis orientasi kurikulum, yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi.

2. Pengembangan Tujuan

Setelah klarifikasi orientasi kurikulum, langkah berikutnya mengembangkan tujuan umum (aims) dan mengembangkan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Tujuan

²⁹ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum., 79.

umum dalam konteks ini adalah merefleksi pandangan orang (image person) dan pandangan (image) masyarakat. Tujuan pengembangan merupakan tujuan yang masih umum, maka perlu dikembangkan tujuan-tujuan yang lebih khusus hingga pada tujuan instruksional.

3. Identifikasi Model Mengajar

Strategi mengajar harus sesuai dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan model mengajar yang akan digunakan, yaitu:

- a) Di sesuaikan dengan tujuan umum maupun tujuan khusus.
- b) Strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan siswa.
- c) Guru yang menerapkan kurikulum ini harus sudah memahami secara utuh, sudah di latih, dan mendukung.
- d) Tersedia sumber-sumber yang esensial dalam pengembangan model.

e. Implementasi

Implementasi sebaiknya dilaksanakan dengan memerhatikan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, peranan, pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi, dan sistem, dan sistem monitoring. Langkah ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan kurikulum.³⁰

³⁰ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum., 79.

Berdasarkan beberapa model pengembangan kurikulum, dengan memperhatikan suatu proses sistem perencanaan program pembelajaran, standart keberhasilan, berdasarkan pada perkembangan teori dan praktik kurikulum. di harapkan pendidikan di Indonesia mampu menjadi lebih baik.

C. Tinjauan Tentang *Boarding School*

1. Pengertian *boarding school*

Boarding school adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. *Boarding school* memadukan tempat tinggal para siswa di institusi sekolah yang jauh dari rumah dan keluarga mereka dengan diajarkan agama serta pembelajaran beberapa mata pelajaran di tempat yang sama.

Yang dimaksud *full-day school* merupakan program pendidikan yang menyediakan waktu akademik lebih panjang daripada program pendidikan pada umumnya. Waktu akademik ini digunakan untuk melatih keterampilan sosial anak dengan kebebasan menentukan pilihan waktu. Program *full-day* lazimnya berlangsung antara pukul 08.00 – 14.30, sedangkan program *half-day school* berlangsung 08.00 – 11.00.

Program *full-day school* dan *half-day school* di luar negeri seperti di Amerika Serikat diperuntukkan untuk pendidikan Pra-Taman Kanak-Kanakan Taman Kanak-Kanak (TK) (NCES, “*Full-day and Half-day*”).³¹

Sistem pendidikan sekolah *boarding school* adalah sistem dimana siswa tidak diperkenan pulang kerumah setelah kegiatan pembelajaran telah

³¹Maksudin, “Sistem Boarding School SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta”, *Transformasi dan Humanisme Religius*, 31 (Februari, 2012), 44.

selesai akan tetapi pulang ke asrama dan di asrama tersebut para siswa dipantau selama 24 jam perilakunya, kegiatan keseharian, serta tingkat akademiknya. Di sekolah boarding school siswa tidak hanya dituntut untuk bisa berprestasi dalam segi akademisnya akan tetapi lebih dari itu. Siswa juga harus berprestasi dalam beberapa hal diantaranya sikap religius, karakter islami, ilmu-ilmu tentang keislaman baik itu ilmu yang bersifat klasik sampai ilmu yang sedang berkembang pada generasi modern sekarang atau biasa disebut dengan perkembangan ilmu konteporer.

2. Sejarah *boarding school*

Sistem pendidikan seperti diatas biasa kita sebut dengan istilah *boarding school* (sekolah berasrama). Sekolah ini muncul sejak abad pertengahan tahun 1990 hal ini dilatar belakangi oleh pendidikan Indonesia yang dirasa kurang mampu dalam memenuhi harapan yang ideal. Boarding school yang pola pendidikannya lebih kprehensif-holistik yang lebih memungkinkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal dan diharapkan mampu melahirkan orang-orang yang dapat membawa pergerakan kehidupan sosial, politik, ekonomi serta agama yang lebih baik.³²

Dari pengertian diatas sejarah munculnya sistem *boarding school* dikarenakan kebutuhan zaman yang menuntut perubahan dalam sistem pondok pesantren yang dulunya menganut sistem salaf atau lama diganti dengan sistem yang lebih modern dengan ditujukan untuk mengikuti perubahan sosio masyarakat ke arah yang lebih maju atau modern.

³²Khamidiyah, *Sistem Boarding school Dalam Pendidikan Karakter Siswa Kelas VII Mts Nurul Falah Kota Gede Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Nankalijaga, 2013), 3.

3. Tujuan boarding school

Tujuan *boarding school* sebenarnya tidak jauh dari tujuan pesantren, dikarenakan boarding school tidak lain adalah sebagai salah satu manifestasi pembaharuan dari sistem pendidikan pesantren. Berdasarkan tujuan dari didirikannya pesantren sekurang-kurangnya ada dua hal alasan: pertama, pesantren lahir karena sebagai pembatasan dan pencegahan terhadap keberlangsungan moral masyarakat utamanya pendidikan yang sangat kurang baik atau moral yang rusak. kedua, sebagai penyebar ajaran Islam yang Universal ke pelosok nusantara yang berwatak pluralisme , baik yang berdimensi kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial masyarakat.³³

Pondok pesantren baik salaf maupun kholaf, memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi dakwah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga dakwah Islam dapat tercapai dengan sukses apabila ia dapat memainkan peranannya dengan baik. Peran pesantren dapat di petakan menjadi dua hal yakni internal dan eksternal. Peran internal adalah pengelolaan ke dalam yang berupa pembelajaran pada santri. Sedangkan peran eksternal adalah berinteraksi pada masyarakat luas termasuk pemberdayaan dan pengembangannya.³⁴

Oleh sebab itu tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan pendidikan,

³³Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri* (Yogyakarta: Teras, 2009), 25.

³⁴ Muhammad Jamaludin, *Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi*, Vol. 20 Tahun 2012

disamping faktor-faktor lain yang terkait: pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan dari berbagai konsep yang diterapkan di boarding school, maka tujuan boarding school yaitu:

- a. Menghasilkan generasi yang beraqidah, shalih, berkepribadian matang, mandiri, sehat, disiplin, dan bermanfaat tinggi.
- b. Menghasilkan generasi berprestasi dalam akademik dan daya saing tinggi
- c. Menghasilkan generasi yang memiliki kecakapan dan keahlian dalam menunjang kehidupannya.
- d. Menghasilkan generasi mandiri, kreatif, inovatif dan jiwa wirausaha.

Tujuan dari sistem pondok pesantren *boarding school* sebenarnya sama dengan tujuan sistem pondok pesantren salaf akan tetapi pada sistem pondok *boarding school* ini sedikit berbeda karena lebih kearah yang modern atau tidak hanya terpaku dengan penyebaran agama Islam tetapi juga menyangkut masalah pendidikan yang modern dan lain sebagainya.

4. Pendidikan *Boarding School*

Sistem pendidikan pondok pada hakekatnya adalah totalitas interaksi seluruh komponen atau elemen pendidikan pondok pesantren yang bekerja sama secara terpadu untuk saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur agama Islam untuk mencapai tujuan pendidikan pondok pesantren yang telah ditetapkan.

Sistem yang digunakan pondok pesantren menurut Alwi, sebagaimana dikutip oleh Muawwanah:

Sistem pondok pesantren dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu: pertama, sistem ma'hadiyyah dengan menggunakan sorogan,

wetonan, muhawaroh, mudzakaroh, majlis ta'lim, kedua, sistem madrasiyyah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan demonstrasi.³⁵

Di dalam perkembangannya pondok pesantren tidaklah tumbuh atas pola lama yang bersifat tradisional melainkan dilakukan dengan suatu inovasi dalam pengembangan suatu sistem. Dalam perkembangannya, ada tiga sistem yang diterapkan pada pondok pesantren yaitu pertama, sistem klasikal, pola penerapan sistem klasikal ini adalah pendirian sekolah-sekolah. Kedua, sistem kursus-kursus, pola pengajaran yang ditempuh melalui kursus yang ditekankan pada pengembangan ketrampilan tangan. Ketiga, sistem pelatihan, disamping sistem pengajaran klasikal dan kursus, dipesantren jua dilaksanakan sistem pelatihan yang ditekankan pada kemampuan psikomotorik.³⁶

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa ada banyak tipe-tipe pesantren yang memiliki cirri khas dan tujuan output yang berbeda beda tergantung dari kebutuhan yang diinginkan oleh para peserta didik setelah proses pembelajarannya usai.

³⁵ Muawwanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa* (Kediri: STAIN Press, 2009), 29.

³⁶ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri* (Yogyakarta: Teras, 2009), 26.